

Judul : Sigit Sosiantomo, Anggota Komisi V DPR : Semakin Kesini, Semakin Aneh Aja
Tanggal : Kamis, 04 November 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR

Semakin Ke Sini, Semakin Aneh Aja

Syarat perjalanan terkait Covid-19 berubah lagi. Pandangan Anda?

Dasar perubahannya tidak jelas dan mengada-ada. Membuat masyarakat bingung, karena peraturannya berubah-ubah terus. Padahal, di luar negeri seperti AS (Amerika Serikat) dan Australia, tidak ada persyaratan untuk perjalanan domestik. Apalagi kalau sudah vaksin penuh. Termasuk Malaysia, tidak ada kewajiban tes antigen, apalagi PCR untuk perjalanan domestik.

Bagaimana pandangan luar negeri terhadap kondisi Indonesia saat ini?

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan risiko rendah penularan Covid-19. Karena itu, Pemerintah harusnya membuat aturan yang tidak mempersulit perjalanan, khususnya untuk moda transportasi darat, termasuk kendaraan pribadi dan sepeda motor.

Syarat perjalanan saat ini, tes antigen bagi yang sudah dua kali divaksin, bukan PCR. Lebih murah dong?

Syarat itu pun membebani pengguna moda transportasi darat, yang umumnya dari kalangan menengah ke bawah. Kalau biaya antigen Rp 100 ribu per orang, ditambah istri dan dua anak misalnya, maka butuh biaya tambahan Rp 400 ribu untuk



sekali jalan. Itu belum termasuk tarif moda transportasinya. Memberatkan sekali.

Semakin ke sini, Pemerintah semakin aneh saja. Semua pengguna transportasi darat, baik umum maupun pribadi, wajib antigen. Yang aneh lagi, memakai kendaraan pribadi pun harus tes antigen.

Apa dampak aturan ini?

Aturan wajib antigen, secara ekonomi akan menambah biaya perjalanan penumpang. Juga, akan berdampak pada kinerja sektor transportasi darat yang selama hampir dua tahun terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sudah

banyak operator bus yang rugi, bahkan terpaksa tutup karena pandemi.

Sebaiknya bagaimana dong?

Sekarang kasus Covid-19 sudah melandai, jangan mempersulit orang untuk bepergian. Jika Pemerintah masih saja membuat aturan yang membebani penumpang, otomatis akan berimbas pada operator. Bisa lebih banyak yang gulung tikar. Tahun lalu saja, secara umum, kerugian operator mencapai Rp 15,9 triliun per bulan.

Berdasarkan data BPS (Biro Pusat Statistik), tahun 2020, pertumbuhan sektor usaha transportasi dan perdagangan terkontraksi paling parah, yaitu 15,04 persen. Sektor ini yang terpuruk paling dalam dibandingkan lapangan usaha lain. Boleh dibilang, sektor transportasi dalam negeri babak belur sepanjang 2020.

Apakah kondisinya membaik pada tahun ini?

Pada 2021, sektor transportasi juga masih tertekan karena PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan aturan perjalanan yang sangat ketat.

Contohnya?

Selama Januari–Agustus 2021 misalnya, jumlah penumpang penerbangan domestik sebanyak 17,7 juta orang. Jumlah itu turun 18,26 persen dibandingkan periode sama tahun lalu, yang sebanyak 21,6 juta orang. ■ REN